

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Ekonomi Pembangunan**

Ekonomi pembangunan adalah suatu ilmu yang mengajarkan mengenai pembangunan di bidang ekonomi atau salah satu dari percabangan ilmu ekonomi yang difokuskan bahasannya tentang pembangunan di Negara-negara yang statusnya masih tergolong kedalam negara berkembang. Tujuan ekonomi pembangunan yaitu jika dari ilmu ekonomi pembangunan adalah untuk meneliti berbagai faktor yang menyebabkan ketertinggalan pembangunan di Negara berkembang, sehingga dengan mengetahui faktor tersebut yang menghambat pembangunan dapat diketahui bagaimana cara yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas pembangunan di negara berkembang. Dengan demikian, diharapkan kemajuan bisa tercapai di Negara yang bersangkutan.

Ekonomi pembangunan adalah cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara berkembang. Selain berfokus pada metode pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan sosial, ekonomi pembangunan juga memperluas kesempatan bagi penduduk dengan mendukung perbaikan kondisi kesehatan, pendidikan, dan tempat kerja melalui sektor publik atau swasta. Ekonomi pembangunan mencakup

perumusan teori dan metode yang menentukan kebijakan dan praktik dan dapat diterapkan di tingkat domestik maupun internasional. Contohnya adalah restrukturisasi insentif pasar atau penggunaan matematika dalam analisis proyek (misalnya optimisasiinter-temporal), atau perpaduan metode kuantitatif dan kualitatif.

Berbeda dengan bidang ekonomi lainnya, pendekatan ekonomi pembangunan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan politik dalam pembuatan rencana tertentu. Selain itu, tidak ada kepastian soal isu yang perlu dipelajari dalam ekonomi pembangunan. Berbagai pendekatan mempertimbangkan faktor yang mendorong konvergensi atau non-konvergensi ekonomi di tingkat rumah tangga, provinsi, dan negara.

Definisi menurut para ahli sebagai berikut:

- 1) **Adam Smith**, menjelaskan bahwa definisi pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Bertambahnya penduduk suatu negara harus diimbangi dengan kemajuan teknologi dalam produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan dalam negeri.
- 2) **Schumpeter**, menjelaskan bahwa definisi pembangunan ekonomi adalah perubahan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terputus.

- 3) **Sadoro Sukirno**, menjelaskan bahwa definisi pembangunan ekonomi adalah proses untuk meningkatkan pemasukan atau pendapatan perkapita suatu negara dengan cara mengolah potensi ekonomi menjadi bentuk riil.
- 4) **Simon Kuznets**, menjelaskan bahwa definisi pembangunan ekonomi adalah meningkatnya kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam barang yang dibutuhkan penduduknya dalam jangka panjang.

## 2. **Awal Mula Berkembangnya Ekonomi Pembangunan**

Ekonomi pembangunan bukanlah merupakan ilmu yang baru ada, karena bidang ilmu ekonomi ini sedikit terabaikan oleh beberapa sebab. Pertama, beberapa negara berkembang sebelum perang dunia ke-2 merupakan daerah jajahan, sehingga negara penjajah merasa tidak perlu memperhatikan perkembangan daerah jajahan tersebut. Kedua, masih kurangnya keinginan dari para pemimpin negara atau daerah yang dijajah untuk membahas masalah-masalah pembangunan ekonomi. Mereka memiliki dasar pemikiran bahwa pembangunan ekonomi hanya dapat dilakukan jika penjajahan berakhir. Oleh karena itu, mereka hanya berfokus untuk mendeklarasikan kemerdekaan negaranya dan belum memikirkan masalah-masalah pembangunan ekonomi negara mereka. Terakhir, penelitian dan analisis mengenai masalah pembangunan ekonomi masih terbatas.

Pasalnya, pada masa perang dunia ke-2 para ekonom (khususnya ekonom barat) lebih memfokuskan perhatiannya terhadap masalah

pengangguran dan krisis ekonomi. Penyebabnya, pada dekade awal abad ke-20 masalah depresi dan pengangguran dianggap masalah utama yang harus diatasi. Akan tetapi, kondisi mulai berubah setelah perang dunia ke-2 berakhir. Penelitian dan analisis terhadap pembangunan ekonomi mulai berkembang dan meningkat secara signifikan. Hal tersebut didasari oleh beberapa hal. Pertama, meningkatnya keinginan dari negara-negara bekas jajahan untuk mengejar ketertinggalan mereka dengan negara bekas penjajahnya. Beberapa negara seperti Indonesia, India, dan Pakistan merupakan negara bekas penjajahan yang masyarakatnya relatif miskin dan menghadapi masalah kependudukan yang cukup serius. Kedua, meningkatnya perhatian negara-negara maju terhadap negara sedang berkembang, sehingga negara maju bersedia untuk membantu proses pembangunan di negara sedang berkembang. Negara-negara maju melakukan hal tersebut karena alasan ekonomi agar hubungan mereka dengan negara sedang berkembang (terutama hubungan perdagangan) dapat berjalan dengan baik. Dan alasan terakhir, negara maju ingin memperoleh dukungan dalam perang ideologi antara Blok Barat dan Blok Timur.<sup>1</sup>

### **3. Tujuan dan Fungsi Ekonomi Pembangunan**

Ilmu ekonomi pembangunan memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai berbagai macam isu yang terjadi dalam pembangunan ekonomi saat ini, yang dihadapi dan ditemukan di

---

<sup>1</sup>Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: BPFE UGM,2018), hal

negara-negara sedang berkembang. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai kebijakan-kebijakan pembangunan baik secara teoritis maupun fakta aktual yang terjadi di negara-negara berkembang dan transisi di seluruh dunia. Khususnya, negara di Asia, Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan negara-negara transisi di Eropa.

Sedangkan Ekonomi Pembangunan memiliki fungsi dalam menciptakan upaya-upaya dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat di negara sedang berkembang. Sedangkan bagi civitas atau pelajar, ekonomi pembangunan berfungsi sebagai ilmu dalam memahami permasalahan perekonomian negara-negara berkembang di dunia.

#### **4. Peningkatan**

##### **a. Pengertian Peningkatan**

Peningkatan berasal dari kata dasar tingkat, peningkatan memiliki arti dalam kelas nomina, kata benda sehingga peningkatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, peningkatan mengandung arti menaikkan derajat taraf, kemajuan, memperhebat, bertambah dan sebagainya. Menaikkan dalam artian bahwa usaha untuk mengangkat sesuatu hal dari yang semula memiliki posisi yang rendah menuju kepada posisi yang lebih tinggi.

Pengertian peningkatan menurut Adi, dalam kamus bahasanya menyatakan istilah peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti berlapis-lapis dari sesuatu yang tersusun sedemikian

rupa, sehingga membentuk suatu susunan yang ideal, sedangkan peningkatan adalah kemajuan dari seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Peningkatan merupakan proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya.

Kata dasar tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf dan kelas, sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Peningkatan secara umum menurut Adi, merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas, peningkatan juga dapat menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif menjadi positif. Hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan, sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu obyek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu.

#### **b. Dasar hukum Peningkatan**

Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada anggota masyarakat dan sangat mencegah sirkulasi kekayaan hanya sebatas orang tertentu saja, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr Ayat 7:<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Robbani. *Al Quran dan terjemahnya...*, hal. 547

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ  
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ  
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)

**Artinya :** “Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu. Apa yang diebrikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7)

Kandungan Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 menjadi bukti konkret totalitas Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan khususnya dalam distribusi kekayaan. Kekayaan yang diciptakan Allah SWT dan dianugerahkan kepada manusia itu tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang saja, pemerataan dalam distribusi kekayaan menjadi sebuah keharusan di dalam Islam, agar tidak menimbulkan kesenjangan yang tinggi, negara wajib mewujudkan konsep keseimbangan dalam masyarakat khususnya pendistribusian kekayaan guna meningkatkan kesejahteraan.<sup>3</sup>

## 5. Infrastruktur

### a. Pengertian Insfrastuktur

Infrastruktur (*infrastructure*), menurut definisi Oxford Dictionaries adalah struktur fisik dan organisasi dasar (seperti

<sup>3</sup> Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. (Jakarta : Prenamedia Group, 2015) hal.

bangunan, jalan, pasokan energi) yang diperlukan untuk beroperasinya masyarakat dan institusi. Pakar membagi infrastruktur dalam tujuh kelompok yaitu transportasi (jalan, jalan raya, jembatan) pelayanan transportasi (bandara, pelabuhan, terminal), pengairan (saluran air, sistem pengairan, bendungan), pengelolaan limbah, bangunan, komunikasi, serta distribusi dan produksi.<sup>4</sup>

Pembangunan fisik atau infrastruktur, Effendi menyebutkan pentingnya Infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi.<sup>5</sup>

Grigg menyatakan infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Pembangunan fasilitas publik yang memadai dapat meningkatkan perekonomian yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Ir. Sulistijo Sidarto, *Proyek Infrastruktur dan Senketa Kontruksi*, Kencana hal. 1

<sup>5</sup>Florentinus Belareq, "Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat", dalam *eJournal Ilmu Pemerintahan* 2017. hal. 706

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 706

Berbagai fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh agen-agen publik yang bertujuan untuk memenuhi tujuan sosial dan ekonomi serta fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pembuangan limbah listrik, penyediaan air, dan pelayanan-pelayanan lainnya yang serupa merupakan infrastruktur menurut pendapat Stone. Pembangunan infrastruktur dikendalikan oleh pemerintah dengan harapan terwujudnya pemerataan pembangunan.

Vaughn dan Pollard menyebutkan infrastruktur merupakan prasarana pendukung seperti jalan, jembatan, air, bandara, pelabuhan, sekolah, fasilitas kesehatan, pembangkit listrik dan fasilitas lainnya yang diperuntukkan untuk pelayanan publik, menunjang dan mendorong aktivitas ekonomi maupun sosial suatu masyarakat. Pembangunan infrastruktur perlu disesuaikan dengan kebutuhan wilayah agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam sudut pandang ekonomi, Moteff menyatakan infrastruktur juga melibatkan dalam hal pertahanan dan keberlanjutan pemerintah. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah diperuntukkan untuk seluruh elemen masyarakat dari desa hingga ke kota, tidak hanya pembangunan jangka pendek, namun untuk jangka menengah maupun jangka

panjang yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat, dengan harapan menghapus kesenjangan pembangunan yang tidak merata.<sup>7</sup>

Infrastruktur memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan jangka pendek, menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi, jangka menengah dan jangka panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait merupakan pendapat Ja'far. Infrastruktur menjadi jawaban dari kebutuhan negara-negara yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung tumbuhnya pusat ekonomi dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa.<sup>8</sup>

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan dinamika organisasi publik yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah.<sup>9</sup> Pembangunan infrastruktur merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan social ekonomi pada suatu daerah karena tanpa adanya

---

<sup>7</sup>*Analisis dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan usaha ekonomi rakyat di Kota Semarang* hal. 84

<sup>8</sup> Yonatan, Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, *Jurnal Administrative Reform*, Vol.2 No.4, Desember 2014, hal. 541

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 541

infrastruktur yang memadai kegiatan perekonomian kurang lancar dan dapat menghambat pembangunan.

## **b. Jenis-Jenis Infrastruktur**

### **1. Infrastruktur keras**

Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dengan kegunaannya memang berasal dari bentuk fisik yang dimilikinya tersebut. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Mayoritas masyarakat mengartikan infrastruktur keras yaitu bandara, kereta api, pelabuhan dermaga, saluran irigasi, got, bendungan, dan jalan raya.

### **2. Infrastruktur keras Non-Fisik**

Infrastruktur non fisik merupakan infrastruktur keras yang tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, akan tetapi berguna dan mendukung keberadaan infrastruktur keras lainnya. Infrastruktur keras non fisik sangat berkaitan erat dengan permasalahan kepuasan publik. Infrastruktur keras non fisik biasanya hanya bisa dirasakan kegunaannya ketika di gabungkan ataupun digunakan bersama-sama dengan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur keras, ataupun infrastruktur lunak. Pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan pipa penyalur, jaringan komunikasi seperti internet, telepon, ketersediaan saluran gas, pasokan energi merupakan contoh infrastruktur non fisik.

### 3. Insfrastuktur Lunak

Infrastruktur lunak merupakan infrastruktur yang berbentuk kelembagaan ataupun kerangka institusional, infrastruktur lunak pada dasarnya harus dibangun dengan memperhatikan berbagai macam nilai dan norma, seperti nilai budaya, norma agama, norma asusila, norma hukum, dan berbagai norma lainnya. Infrastruktur lunak berkaitan dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah, contohnya pelayanan kantor pos, pelayanan polisi, pelayanan kamtor kecamatan dan berbagai infrastruktur lunak lainnya.<sup>10</sup>

#### c. Manfaat Insfrastuktur

Besarnya aspek infrastruktur memberikan banyak manfaatnya, terutama dalam menopang pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara yaitu :

- a) Meningkatkan konektivitas antarwilayah atau antarnegara
- b) Meningkatkan produktivitas suatu wilayah atau negara
- c) Meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya
- d) Mempercepat pemerataan pembangunan suatu wilayah atau negara
- e) Mendorong investasi baru yang masuk ke wilayah atau negara tersebut.<sup>11</sup>

#### d. Dampak Ketidaksediaan Insfrastruktur

---

<sup>10</sup>Florentinus B, *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat*, dalam *ejournal Ilmu Pemerintahan Tahun 2017* hal. 707

<sup>11</sup>Ir. Sulistijo Sidarto, *Proyek Infrastruktur dan Senketa Kontruksi*, hal. 1

Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam. Demikian kuatnya penekanan Islam pada penegakan keadilan sosio-ekonomi, sehingga suatu yang keliru klaim kapitalis maupun sosialis yang menyatakan bahwa hanya mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.<sup>12</sup>

Ketidakterediaan infrastruktur yang memadai akan berdampak buruk bagi suatu wilayah atau negara seperti rendahnya kualitas hidup, kesulitan dalam pemberantasan kemiskinan, serta menurunkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing, oleh karena itu setiap negara berupaya untuk terus menambah ketersediaan infrastruktur dalam rangka mempercepat pembangunan, baik pembangunan ekonomi maupun sosial, guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya lebih sejahtera.<sup>13</sup>

## **6. Perekonomian**

### **a. Pengertian Perekonomian**

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem perekonomian terencana memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi.

Keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasi perilaku masyarakat para produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan

---

<sup>12</sup>Fauzan, *Mewujudkan Ekonomi Islam dengan Ruh Al-.,Adl.* (An-Nisbah, Vol. 02, No. 01 Oktober 2015) hal. 419

<sup>13</sup>*Ibid*, hal 2

sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari merupakan sistem ekonomi menurut Gilarso.

Grossman dan Manu, menyebutkan sistem ekonomi adalah komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhuungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi.

#### **b. Perubahan Struktur Perekonomian**

Struktur perekonomian daerah pedesaan masih berat sebelah pada sektor pertanian (kontribusi sektor pertanian masih sangat besar). Meskipun kontribusi sektor pertanian masih sangat besar, namun pembangunan daerah pedesaan memperlihatkan perkembangan yang nyata, seperti diterapkannya mekanisme sistem pertanian, penggunaan bibit atau benih unggul, dan sarana produksi lainnya yang lebih baik, telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan.

Orientasi pembangunan daerah pedesaan diarahkan pada sasaran, penguatan ketahanan pangan, menunjang pengembangan sektor industri dan mendorong ekspor, memperluas lapangan kerja di daerah pedesaan yang diharapkan dapat mengurangi arus penduduk pedesaan berurbanisasi ke kota-kota besar serta

mengembangkan kerja sama antar daerah pedesaan untuk memperkuat struktur perekonomian pedesaan.

## **7. Desa**

### **a. Pengertian Desa**

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Desa atau pedesaan berasal dari bahasa *Sansekerta* secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kerajaan.

Utoyo menyatakan desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencaharian dibidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan.<sup>52</sup> Suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain (kekeluargaan) dengan derajat keintiman yang tinggi serta

memusatkan perhatian pada pertanian sebagai mata pencaharian merupakan definisi desa menurut Landis.<sup>14</sup>

Hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksiantar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain, merupakan definisi desa menurut Bintarto.

Desa menurut Soenardjo merupakan kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah tertentu, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Desa menurut Maschab dalam pengertian sosiologis adalah kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dan menetap pada suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik, memiliki rasa kekeluargaan, gotong royong dan corak

---

<sup>14</sup>Sidik Permana, *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*. 2016 hal. 2

kehidupan masyarakat setempat relatif homogen serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam.<sup>15</sup>

Dalam UU No 6 tentang Desa, pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif. Perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun.

Desa membangun mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumberdaya alam serta lingkungan berkelanjutan. Sedangkan aspek yang menjadi prioritas dalam desa membangun antara lain peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya alam lokal yang tersedia.

#### **b. Tujuan Pengaturan Desa**

Pasal 4 Undang-Undang Desa, menguraikan tujuan pengaturan Desa sebagai berikut :

- a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>15</sup>Indrasto Wahyudi, *“Peranan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Senada Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa”*, hal. 45

- b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat.
- d) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- e) Membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka serta bertanggung jawab.
- f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- h) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- i) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.<sup>16</sup>

**c. Perencanaan Pembangunan Desa**

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang bersinambungan, yang mencakup keputusan-keputusan atau

---

<sup>16</sup>Kementerian Desa, *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Indeks Desa Membangun 2015*. hal. 2

pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.<sup>17</sup>

Definisi tersebut mengedepankan 4 unsur dasar perencanaan, yakni:

- a) Pemilihan (proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan)
- b) Sumber daya (Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya)
- c) Tujuan (Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan)
- d) Waktu (Perencanaan mengacu ke masa depan).<sup>18</sup>

Berry dalam buku *Perencanaan Pembangunan Daerah, (allocative opportunity-seeking)* perencanaan yang berorientasi ke masa depan dan disusun berdasarkan kecenderungan saat ini untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa yang akan datang.<sup>19</sup>

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalan potensi lokal dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan, secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut :

- a) Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.

---

<sup>17</sup> D. Conyers and Hill, *Konsep Perencanaan Pembangunan*. (1984), hal. 271

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Kementerian Desa, *Pembangunan Daerah...*, hal. 2

- b) Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), dusun dan desa.
- c) Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.
- d) Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan masa depan.<sup>20</sup>

#### **d. Tujuan Pembangunan Desa**

Djiwandono menyebutkan beberapa tujuan pembangunan desa, sebagai berikut :

- a) Tujuan ekonomi, meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
- b) Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
- c) Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
- d) Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*. (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2012) hal. 262

<sup>21</sup>*Ibid*, hal. 242

#### e. Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam PP 72/2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Kemudian Pasal Penjelas PP 72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri atas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam Pasal Penjelas pula disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk pemerintahan desa dan BPD.<sup>22</sup>

Menurut Solekhan dalam Putra Nugraha, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kepada desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan

---

<sup>22</sup> Putra Nugraha, Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Maleku, *Jurnal WALASUJI Volume 10, No. 2, Desember 2019*, hal. 307

prasarana, serta sumber daya manusia oleh karena itu terdapat anggaran sebagai modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa. Terkait dengan ADD (Alokasi Dana Desa) sebenarnya lanjutan dari program bantuan desa tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Namun sejak diberlakukan otonomi daerah, ADD kemudian dialokasikan melalui APBDes.<sup>23</sup> Oleh karena itu, pemerintah kabupaten wajib memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan. Pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis (lihat Pasal 54 UU Desa). Kemudian, hasil musyawarah desa berupa perencanaan pembangunan desa ditindaklanjuti dengan musyawarah pembangunan perencanaan desa (musrenbangdes) yang diselenggarakan Musrenbangdes inilah yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tiap enam tahun sekali dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta APBDes tiap setahun sekali.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 307

<sup>24</sup> Siti Khoiriah dan Utia Meylina, Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa, *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 1, Januari 2017, Halaman 20-29, hal. 27

Dana Alokasi Desa yang diserahkan haruslah sesuai dengan karakteristik desa yang bersangkutan. Desa yang mempunyai wilayah luas dengan struktur perangkat desa yang banyak harus mendapatkan porsi dana alokasi lebih besar dari desa yang mempunyai karakteristik wilayah sempit dengan struktur perangkat desa yang sedikit.<sup>25</sup> Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi karakteristik wilayah desa sebelum menggunakan konsep dana alokasi desa, agar tidak terjadi kesalahpahaman besaran proporsidana alokasi Desa.

Dana Desa menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian Desa, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status Desa.<sup>26</sup> Dalam Buku Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak, Pengelolaan Dana Desa sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>27</sup>

Berikut ini fungsi dana Desa:

- a) Diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
- b) Sarana Prasarana, Pelayanan Sosial Dasar, Sarana Ekonomi Desa, Pembangunan Embung, Pelestarian Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana Alam.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 27

<sup>26</sup> Kementerian Keuangan RI, *Buku Pintar Dana Desa*, PDF (2017), hal. 19

<sup>27</sup> Sri Palupi dkk, *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, (Lakpesdam PBNU: Jakarta, 2016), hal. 77

c) Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial dan kesejahteraan Masyarakat, Pengelolaan Sumber Daya Lokal, Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif, Penguatan Kapasitas terhadap Bencana, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Tata Kelola Desa yang Demokratis.<sup>28</sup>

Adapun menurut Siti Khoiriah dan Utia Meylina, tujuan dana Desa berdasarkan tujuan penataan desa seperti yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:<sup>29</sup>

- a) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d) Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e) Meningkatkan daya saing Desa

Sedangkan menurut Hanif Nurcholis, dana Desa memiliki tujuan antara lain:<sup>30</sup>

- a) Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan dan Infrastuktur di tingkat Desa serta pemberdayaan masyarakat;

---

<sup>28</sup> Tim Penyusun, *Dana Desa Untuk Peningkatan Kualitas Hidup*, (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, 2017), hal. 9

<sup>29</sup> Siti Khoiriah dan Utia Meylina, *Analisis Sistem...*, hal. 22

<sup>30</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Grasindo, Jakarta, 2011), hal. 89

- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
- d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e) Meningkatkan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat;
- f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- h) Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

## **8. Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat ialah kondisi atau hal dimana orang-orang yang berada didalam suatu daerah tersebut memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai warga masyarakat. Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa pemerintah desa salah satu di dukung oleh adanya pengelolaan badan usaha milik desa atau Bumdes.<sup>31</sup> Pembentukan Bumdes guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang di

---

<sup>31</sup> Rofiyqo, Artikel Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Butang Baru Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, <https://repository.unja.ac.id/2391/1/ARTIKEL>, diakses pada 16 April 2020

serahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek pemerintah dan pemerintah daerah.

Kesejahteraan Masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>32</sup> Menurut Kolle (1974), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:<sup>33</sup>

- a) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
- b) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
- c) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- d) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Taslim menambahkan, dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa factor yang

---

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

<sup>33</sup> R Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Ghalia Indonesia Yogyakarta, 1989) dalam Nurul Farida, *Pemodelan Koperasi Wanita Dalam Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Di Kabupaten Blitar*, *Akuntabilitas, Volume 11, Nomor 1, Juni 2018, Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Ekonomi*, hal. 14

menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain:<sup>34</sup>

- a) Social ekonomi dan keuangan rumah tangga atau masyarakat dalam satu wilayah,
- b) Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat,
- c) Potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan
- d) Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global

Sardar dalam jurnal Ekonomi Syariah teori dan terapan, menuliskan kesejahteraan masyarakat dalam islam menurut P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a) Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya.

Demikian pula manusia memiliki dimensi individual

---

<sup>34</sup> Devani Ariestha Sari, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Bandarlampung*, (Skripsi Universitas Lampung, 2016), hal. 17

<sup>35</sup> Sardar, *Kesejahteraan dalam Prespektif Islam pada Karyawan Bank Syariah*. (Jurnal Ekonomi Syariah teori dan terapan Vol.3 No. 5 Mei 2016) hal. 394

sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

- b) Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.

*Fallah*, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti untuk mengetahui Peran Dana Desa dalam Meningkatkan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan seperti yang dilakukan:

Penelitian yang dilakukan oleh Hafid,<sup>36</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dana desa digunakan sesuai dengan program, hasil-hasil dari pemanfaatan dana desa dan keterlibatan masyarakat di Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang pemanfaatan dana desa dalam pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, juga melalui observasi dan dokumentasi hasil-hasil pemanfaatan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah program-program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui Musrenbang. Persamaan penelitian ini adalah terfokus pada Pemanfaatan Dana Desa. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian pada Pembangunan Desa, penelitian yang dilakukan sekarang objek penelitiannya adalah Meningkatkan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat.

---

<sup>36</sup>Risma Hafid, *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep 2016*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar: tidak diterbitkan, 2017), hal. ii

Penelitian yang dilakukan oleh Afni,<sup>37</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan desa di desa teluk lecah, dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan penyebaran angket (Kuisisioner). Sedangkan jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Untuk menganalisa data dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan secara deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh yaitu data sekunder dan data primer berupa hasil observasi, wawancara dan penyebaran angket (kuisisioner). Setelah dilakukan analisa maka disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa di desa teluk lecah kecamatan rupa tidak baik. Hasil Penelitian: faktor penghambat pelaksanaan pembangunan desa di desa teluk lecah kecamatan rupa kabupaten bengkalis adalah, kurangnya anggaran yang didapatkan, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, dan terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Persamaan penelitian ini adalah pada Pelaksanaan Pembangunan Desa. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara akan tetapi berdasarkan angket (kuisisioner). Sedangkan perbedaanya adalah penelitian ini difokuskan pada faktor Pelaksanaan Pembangunan dan objek penelitiannya adalah Otonomi Desa.

---

<sup>37</sup> Wirda Afni, *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru: tidak diterbitkan, 2013), hal. 2

Penelitian yang dilakukan oleh Natsir,<sup>38</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Lembang Bangkelekila' Kecamatan Bangkelekila' Kabupaten Toraja Utara. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Lembang Bangkelekila' perlu untuk lebih ditingkatkan, hal tersebut dilihat dari pelaksanaannya yang tidak transparansi serta kurangnya koordinasi dengan pemerintah Daerah dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang belum maksimal. Persamaan penelitian ini adalah pada Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini hanya difokuskan pada Pembangunan Infrastruktur.

Penelitian yang dilakukan oleh Almira,<sup>39</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi pembangunan infrastruktur di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dalam menunjang perekonomian pedesaan. Penelitian ini menggunakan

---

<sup>38</sup> Mustika Natsir, *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekila', Kabupaten Toraja Utara*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar : tidak diterbitkan, 2017), hal. xv

<sup>39</sup> Dea Tachta Almira, *Peningkatan Infrastruktur dalam menunjang Perekonomian Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung*, (Skripsi IAIN Tulungagung: tidak diterbitkan, 2019), hal. xv

pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Teknik analisis data menggunakan data primer diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan data sekunder. Data yang digunakan dari Dokumen Dana Desa (DD) dalam kurun waktu Tahun 2015, 2016 dan 2017 untuk Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan dan menunjang perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan anggaran Dana Desa (DD), yang berdampak pada kualitas infrastruktur meningkat serta pemerataan pembangunan di desa dapat optimal. Mempertimbangkan perencanaan pembangunan tahun lalu untuk di tetapkan pada tahun yang akan datang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) turut berperan dalam mensukseskan pembangunan desa. Persamaan penelitian ini adalah terfokus pada Peningkatan Infrastruktur Desa dan data diperoleh dari Dokumen Dana Desa (DD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Sedangkan perbedaanya adalah Peningkatan Infrastruktur dalam rangka penunjang Perekonomian.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana,<sup>40</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama untuk mendeskriptifkan atau melukiskan secara detail dan mendalam mengenai proses pelaksanaan dana desa sehingga dapat memberikan peran/kontribusi sesuai yang diharapkan pemerintah pusat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara bebas terpimpin, observasi dan dokumentasi.

---

<sup>40</sup> M. Indra Maulana, *Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: tidak diterbitkan, 2018), hal. 3

Setelah peneliti mengumpulkan data kemudian dilakukan langkah selanjutnya yaitu Analisis data. Analisa yang peneliti lakukan menggunakan dua cara yaitu mengolah data awal dan mengklasifikasikanya dan tahap berikutnya data tersebut akan dianalisa. Dari hasil penelitian pengolahan dana desa yang ada di Desa Sinar Palembang kec. Candipuro, kab Lampung selatan, berjalan dengan berpatokan pada petunjuk teknis yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat dari tahun 2015 sampai pada tahun 2017 mulai meningkat dilihat dari pembangunan namun masih minim dalam peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah terfokus pada Peran Dana Desa. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaanya adalah Peran Dana Desa digunakan dalam memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Karimah,<sup>41</sup> penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, beberapa *stakeholders* juga belum melaksanakan

---

<sup>41</sup> Faizatul Karimah, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, hal. 597

perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa. Persamaan penelitian ini adalah analisis Dana Desa dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah Alokasi Dana Desa digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan Pemberdayaan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muslihah, dan Siregar,<sup>42</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Dana desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan membandingkan indikator pembangunan dan kesejahteraan antara sebelum dan setelah adanya Dana desa. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian metode kuantitatif dengan uji beda rata-rata yaitu *Paired Sample T-Test*. Metoda analisis data menggunakan uji beda dua rata-rata untuk melihat dampak yang dihasilkan dari alokasi Dana desa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat antara sebelum adanya Dana desa dan setelah

---

<sup>42</sup> Siti Muslihah & Hilda Octavana Siregar, Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Article History* Vol. 7 No. 1, July 2019, 85-93, hal. 85

diberikannya Dana desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemberian Dana desa oleh pemerintah memberikan dampak terhadap pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Persamaan penelitian ini adalah terfokus pada Alokasi Dana Desa, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah menganalisis dampak Dana Desa dengan menggunakan metode kuantitatif uji beda rata-rata *Paired Sample T-Test*.

Penelitian yang dilakukan oleh Asnudin,<sup>43</sup> Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pelibatan masyarakat dalam proses Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2009 dan dampak yang ditimbulkan, serta data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk pembelajaran pada kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Metode analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian tersebut dengan menggunakan full populasi, yaitu di sejumlah 25 desa sasaran PPIP Propinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pembangunan infrastruktur perdesaan sekalipun cukup fungsional dan masyarakat puas dengan kinerja teknisnya, namun masih rendah tingkat keberlanjutannya. Karena itu, dibutuhkan fokus perhatian proyek pada masa yang akan datang, seperti (1) meningkatkan aspek pengorganisasian masyarakat, (2) transparansi, dan (3) akuntabel, serta (4) berkelanjutan. Persamaan penelitian ini adalah terfokus pada masyarakat dan Pembangunan infrastruktur. Penelitian ini juga menggunakan Metode analisis deskriptif. Sedangkan perbedaannya

---

<sup>43</sup> Andi Asnudin, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat, *Jurnal SMARTek*, Vol. 7, No. 4, Nopember 2009, hal. 1

adalah pelibatan masyarakat dalam proses Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yonatan, Fitriyah, dan Margono,<sup>44</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Publik di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Analisis data melalui tahapan-tahapan yaitu dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data/menerik kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembangunan infra struktur yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau melalui Program Gerakan pembangunan Desa Mandiri telah mengalami perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Dengan dibangunnya prasarana jalan dan jembatatan di daerah tersebut, tidak ada lagi masyarkat desa yang terisolasi, meskipun pembangunan prasarana jalan dan jembatan yang dilakukan pemerintah kecamatan Mentarang meskipun kurang optimal, tetapi tidakan yang dilakukan telah memberikan kontribusi yang lebih besar untuk memperlancar kepentingan masyarakat baik dibidang kesehatan, pendidikan dan bidang ekonomi (pasar). Persamaan penelitian ini adalah terfokus pada Pembangunan infrastruktur. Penelitian ini juga menggunakan Analisis data melalui tahapan-tahapan yaitu dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian ini hanya membahas Implementasi Pembangunan Infrastruktur.

---

<sup>44</sup> Yonatan, Nur Fitriyah, & Antonius Margono, mplementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, *Jurnal Administrative Reform*, Vol.2 No.4, Desember 2014, hal. 1

Penelitian yang dilakukan oleh Berlin,<sup>45</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang sebuah pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kecamatan Porong kabupaten Sidoarjo yang terkena dampak semburan Lumpur Lapindo. Berbagai usaha sudah dilakukan pemerintah dalam memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat korban dari semburan lumpur lapindo. Tujuan bupati kabupaten Sidoarjo yaitu mementingkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, maka dari itu pemerintah terus menerus melakukan pembangunan dan berusaha untuk memenuhi permintaan dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa diabaikan oleh pemerintah. Dan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dimana penelitiannya menggunakan metode wawancara dan melaksanakan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan pemerintah akan terus memperhatikan keadaan masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini juga menggunakan Analisis kualitatif. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian ini hanya membahas Implementasi Pembangunan Infrastruktur dengan lingkup lebih luas yaitu kecamatan.

---

<sup>45</sup> Yuanita Berlin, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pada Lokasi Dampak Semburan Lumpur Lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 1, hal. 1